

PERKEBUNAN DAN PERKEMBANGAN SALURAN IRIGASI DI SLEMAN TAHUN 1870-1930

Oleh : Primastuti Nur Malinda, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, primanurmalinda@gmail.com

ABSTRAK

Perkebunan dan saluran irigasi merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Perkebunan kolonial secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan saluran dan kelembagaan irigasi. Adanya saluran irigasi di Sleman dapat menunjang perekonomian masyarakat melalui pertanian dan perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perkebunan dan irigasi di Sleman dan dampak yang ditimbulkan dari adanya perkembangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa irigasi di wilayah Sleman berkembang seiring dengan adanya perkebunan-perkebunan kolonial Belanda. Sebelum adanya irigasi teknis, irigasi wilayah Sleman dimulai dengan irigasi tradisional berdasarkan gravitasi sampai dengan dibangunnya Bendung Karang Talun dan Saluran Van der Wijck. Perkebunan-perkebunan mengalami peningkatan hasil panen sejak adanya pembangunan saluran irigasi dan pembaharuan lembaga pengairan. Masyarakat mengalami hal yang sebaliknya, masalah pembagian air yang berlangsung antara perkebunan dengan petani berdampak pada meningkatnya beban rakyat dikarenakan merosotnya pendapatan petani akibat gagal panen serta beban pajak pemakaian air dan pemeliharaan irigasi. Perkebunan secara tidak langsung berdampak pada adanya reorganisasi agraria terkait dengan persewaan tanah, yang mengakibatkan berubahnya struktur masyarakat.

Kata Kunci: *Irigasi, Perkebunan, Sleman*

PLANTATION AND DEVELOPMENT OF IRRIGATION CHANNEL IN SLEMAN 1870-1930

ABSTRACT

Plantations and irrigation channels are two interrelated aspects. Colonial plantations indirectly affect the development of irrigation channels and institutions. The existence of irrigation channels in Sleman can support the economy of the community through agriculture and plantations. This study aims to determine the development of plantations and irrigation in Sleman and the impact of these developments. The results showed that irrigation in the Sleman region developed by the existence of Dutch colonial plantations. Before their technical irrigation, irrigation area of Sleman begins with the traditional irrigation by gravity until the construction of Karang Talun dam and Van der Wijck channel. Plantations have increase in the amount of harvest since the construction of irrigation channels and renewal of irrigation institutions. People experience the opposite, the problem of water distribution that took place between plantations and farmers had an impact on increasing the burden of the people due to the decline in farmers' income, due to crop failure and the tax burden on water use and irrigation maintenance. Plantations indirectly have an impact on agrarian reorganization related to land rent, which results in a change in the structure of society.

Keywords: *Irrigation, Plantation, Sleman*

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan kultur tradisi utama kehidupan sejak dahulu yang berfungsi sebagai basis perekonomian masyarakat pedesaan di pulau jawa. Masyarakat tradisional Indonesia sesungguhnya telah mengenal teknologi penanaman padi jauh sebelum kedatangan bangsa barat. Kemampuan bertanam padi tidak lepas dari keadaan geologis dan struktur tanah di Pulau Jawa yang mempunyai banyak gunung berapi sehingga menyuburkan tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Ketersediaan air yang melimpah dan kondisi tanah yang subur di wilayah Pulau Jawa dipandang kaum kolonial sebagai tempat yang sesuai untuk mengembangkan usaha-usaha perkebunan berbagai komoditi ekspor penting perdagangan masa itu. Hal ini juga yang mempengaruhi adanya pemberlakuan sistem tanam paksa yang diprakarsai oleh seorang Gubernur Jenderal Belanda, Van Den Bosch. Pada dasarnya, motif utama pelaksanaan sistem tanam paksa yang dilaksanakan sejak tahun 1830 adalah karena kesulitan finansial yang dihadapi pemerintah Belanda sebagai akibat Perang Jawa (1825-1830).¹

Menjelang abad ke-20, Pemerintahan Kolonial Belanda menerapkan kebijakan Politik Etis dengan tiga unsurnya yaitu Irigasi, Edukasi, Emigrasi. Aspek irigasi atau pengairan yang

diterapkan didasarkan pada alasan wilayah Hindia Belanda.² Pembangunan saluran irigasi oleh pemerintah Belanda dimulai sejak awal abad ke-18 dan meningkat pesat seiring politik etis berjalan. Dalam irigasi teknis, bendungan dibuat demikian rupa hingga dapat menahan adanya banjir besar. Air disalurkan melalui pintu air ke saluran primer, di sini air diatur sebaik-baiknya sesuai dengan kapasitas penggunaan. Dari saluran primer, disalurkan ke saluran sekunder, kemudian ke saluran tersier, lalu ke saluran tingkat usaha tani dan akhirnya ke petak-petak sawah.³

Daerah Yogyakarta, khususnya Sleman, merupakan daerah yang subur akan tanahnya. Terletak tepat di bawah Gunung Merapi, daerah ini mengandung unsur hara yang tinggi yang menyebabkan tanahnya sangat subur. Tanah yang subur ini dimanfaatkan oleh bangsa Belanda untuk perkebunan. Dalam mendukung hasil perkebunan tersebut, pemerintah kolonial sekitar awal abad ke-XX membangun jaringan

¹A. Daliman, *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 29.

²Uemuro Yasuo, "Perkebunan Tebu dan Masyarakat Pedesaan di Jawa", dalam Akira Nagazumi (ed), *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), hlm. 69.

³Anne Both, "Tinjauan Sejarah Perkembangan Irigasi di Indonesia pada Masa Sebelum Kemerdekaan", dalam Effendi Pasandaran dan Donald. C. Taylor (ed), *Irigasi: Kelembagaan dan Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. 60.

irigasi yang terletak di bagian timur kali Progo⁴ yang mengairi persawahan dan lahan perkebunan di Sleman. Pembangunan irigasi secara teknis di wilayah ini dimulai dengan membangun Bendungan Induk Karangtalun yang kemudian dibangun saluran induk Van der Wijck yang nantinya mengalir wilayah Sleman secara khusus.

Saluran induk Van der Wijck ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah Sleman, baik pihak perkebunan maupun pertanian masyarakatnya. Adanya liberalisasi di wilayah kolonial serta ditetapkannya kebijakan reorganisasi agraria, menguntungkan pihak perkebunan swasta dalam kebebasan eksploitasi. Penghapusan tanah apanage melalui reorganisasi agraria, menjadikan petani memperoleh kebebasan atas tanahnya.⁵ Namun, cara ini justru dimaksudkan agar perusahaan perkebunan dengan mudah mendapat tanah-tanah petani dengan mudah melalui persewaan bebas. Kemudahan ini berdampak besar bagi perluasan lahan perkebunan dan bertambahnya hasil perkebunan.

METODE PENELITIAN

⁴Effendi Pasandaran, *Irigasi: Kelembagaan dan Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), hlm. 7.

⁵Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 97.

Metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian historis. Metode historis merupakan salah satu penyelidikan mengaplikasi metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis suatu masalah. Metode penelitian ini meliputi:

1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam menyusun karya ilmiah. Peneliti kemudian melakukan heuristik di beberapa perpustakaan dan badan arsip guna mencari dan menemukan sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Sumber yang telah peneliti temukan dapat digolongkan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan sumber tersebut dilakukan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan FIB Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan UNY.

2. Kritik Sumber

Setelah melakukan heuristik kemudian dilanjutkan dengan kritik sumber. Kritik sumber dilakukan untuk mencari keabsahan data dengan melakukan penyaringan secara kritis. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern merupakan usaha untuk mendapatkan otentisitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Kritik ekstern mengarah terhadap pengujian aspek luar daripada sumber yang ada. Kritik intern adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber. Kritik intern

digunakan untuk memahami isi pada teks sumber.

3. Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi sebagai upaya untuk merangkai fakta-fakta agar memiliki bentuk dan struktur. Fakta-fakta tersebut ditafsirkan sehingga menemukan struktur logisnya. Selain itu, diperlukan landasan yang jelas agar terhindar dari penafsiran yang semena-mena akibat pemikiran yang sempit. Peneliti mencoba sebisa mungkin menekan subyektivitas dalam proses ini, agar memperoleh fakta sejarah yang objektif.

4. Penulisan Sejarah

Penulisan sejarah merupakan tahap akhir dalam proses penelitian sejarah. Pada proses ini peneliti akan menggambarkan sebuah peristiwa sejarah sesuai dengan metode penulisan sejarah ilmiah. Judul penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penulisan ini adalah “Perkebunan dan Perkembangan Saluran Irigasi di Sleman Tahun 1870 – 1930”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT SLEMAN

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari lima kabupaten di provinsi DIY. Secara administratif kabupaten sleman berbatasan dengan kabupaten lain. Di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Klaten, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Bantul, sedangkan di sebelah barat berbatasan

dengan kabupaten Kulon Progo. Penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 1845 berjumlah 83.539 jiwa. Jumlah ini berkurang pada tahun 1867 dengan jumlah 61.515.⁶

Keadaan sosial masyarakat Sleman didasarkan pada kondisi sosial masyarakat Yogyakarta pada umumnya, yang terdiri dari tiga kelas sosial. Pada wilayah Sleman, golongan priyayi cilik dan kawula dalem atau rakyat rendahan menjadi lebih dominan daripada kelas priyayi luhur, hal tersebut dikarenakan. Kehidupan masyarakat yang didasarkan pada pertanian, juga membentuk suatu struktur sosial yang mendasarkan pada kepentingan tersebut. Kekuasaan seorang raja memiliki pengaruh besar, luasnya wilayah pertanian ditentukan oleh luas wilayah kekuasaan seorang raja.

Keadaan pendidikan tradisional di wilayah Yogyakarta didominasi oleh kearifan – kearifan lokal. Pendidikan dimasukkan kedalam unsur kebudayaan, diantaranya melalui pementasan wayang atau kesenian tradisional yang lain. Pendidikan yang dilaksanakan lebih kepada pendidikan moral dan budi pekerti. Keberadaan seorang wali atau kyai di daerah – daerah juga memberikan pendidikan kepada masyarakat terutama pendidikan agama Islam. Pendidikan formal rakyat Sleman dimulai dengan didirikannya sekolah kelas dua oleh Direktur Pengajaran, Ibadat dan Kerajinan pada

⁶ Vincent J.H. Houben, *Keraton dan Kompeni : Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*, terj. E. Setiyawati Alkhatab., (Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002), hlm.636.

tahun 1908.⁷ Sekolah ini ditujukan untuk anak – anak pribumi pada umumnya. Sekolah mendapat anggaran belanja f 20 sebulan. Mata pelajaran pokok ialah membaca, menulis dan menghitung. Gaji guru sekolah tersebut yaitu f 15, sedangkan calon guru mendapatkan gaji f 7,50. Setelah Kweekschool berdiri, didirikan “sekolah extern” untuk latihan para guru. Murid-murid perempuan mulai diterima pada waktu itu.

Sesuai dengan struktur sosialnya, kondisi ekonomi masyarakat juga ditentukan melalui struktur sosial mereka. Penghasilan dan pengeluaran masyarakat ditentukan dari pekerjaan mereka. Pada umumnya produksi padi setiap *bau* sawah selalu tetap. Setiap *bau* sawah menghasilkan 26,69 pikul padi, dan harga setiap pikul adalah f 2,50 sehingga hasilnya mencapai f 66,76. Hasil tersebut dikenakan pajak sawah sebesar f 29 dan biaya pengerjaan sawah sebesar f 15,- pendapatan bersih petani hanya f 22,76.⁸ Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan petani tersebut dapat berubah seiring dengan meningkatnya harga beras. Pada tahun 1855, harga beras di Yogyakarta meningkat menjadi f 5,00.⁹ Peningkatan ini juga tidak berdampak besar terhadap keuangan rakyat. Hal ini

dikarenakan selama harga beras turun, rakyat harus meminjam uang dan dibayarkan ketika penghasilannya bertambah.¹⁰ Sedangkan untuk masyarakat yang tidak memiliki tanah, mereka berkerja sebagai buruh di perkebunan.

B. PERKEMBANGAN IRIGASI DI SLEMAN TAHUN 1870-1900

Perkebunan memegang perannya pada kondisi ekonomi masyarakat Sleman. Perkembangan saluran irigasi juga dipengaruhi oleh adanya perkebunan – perkebunan kolonial Belanda. Perkembangan saluran irigasi di Sleman dimulai dari saluran irigasi tradisional. Sebelum adanya irigasi teknis, rakyat menggunakan sistem irigasi sederhana untuk mengaliri sawahnya. Mereka menggunakan irigasi gravitasi, dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk pengaliran airnya. Dengan prinsip air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah karena ada gravitasi.¹¹ Di Sleman, irigasi ini diterapkan dari aliran sungai Progo menuju ke daerah Sedayu yang tanahnya lebih rendah.

Meskipun di wilayah Vorstenlanden tidak dikenakan tanam paksa, perkebunan di

⁷ Abdurrachman Surjomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe : Sejarah Sosial 1880 – 1930*, (Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 69.

⁸Suhartono (1991), *loc.cit.*

⁹ Vincent J.H. Houben, *op.cit.*, hlm. 651.

¹⁰ Feriyana Fajarwati, “Legitimasi dan Reorganisasi Sistem Tanah Lungguh di Yogyakarta Awal Abad XX”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2007), hlm. 109-110

¹¹Erman Mawardi, “Desain Hidraulik Bangunan Irigasi”. Sumber: <http://www.galeripustaka.com/2014/03/sejarah-irigasi-di-indonesia.html>. Diakses pada 11 Juli 2018, jam 09.10.

wilayah ini juga didominasi oleh perkebunan tanaman-tanaman ekspor. Di daerah Yogyakarta yang lebih sempit, perkebunan-perkebunan pada masa ini tidak begitu luas hingga tahun 1840-an. Tetapi setelah tahun tersebut sekitar tahun 1855 produksi gula dimulai dalam skala menengah dan penanaman tembakau berkembang pesat setelah tahun 1857.¹² Perkebunan di Yogyakarta berkembang pesat di wilayah sekitar kota, khususnya di sebelah timur kota. Di Sleman pada tahun 1840an terdapat 16 perkebunan.

Sejak adanya tanam paksa, pemerintahan Hindia Belanda secara intensif mulai membangun bendung/bendungan dan jaringan irigasi di pulau Jawa yang pada dasarnya untuk mengamankan dan menunjang sistem tanam paksa, pembangunan jaringan irigasi pada saat tersebut dikelola langsung oleh Binnenlandsch bestuur (BB) dibantu oleh para Bupati sebagai penguasa di daerah. Pada tahun 1854, pengelolaan irigasi dialihkan pada lembaga baru. Pemerintah kolonial Belanda mulai menyadari perlunya lembaga irigasi teknis, maka dibentuklah Departemen Pekerjaan Umum disebut *Departement der Burgelijke Openbare Werken* (B.O.W). Pada masa ini, irigasi dalam skala besar dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Masa ini merupakan kondisi dimana irigasi teknis pemerintah kolonial berhadapan dengan irigasi masyarakat, yang berlangsung lebih dari satu abad. Walaupun pemerintah kolonial Belanda

membangun irigasi skala besar pada sistem persawahan dan irigasi yang dibangun oleh masyarakat, namun masyarakat tetap melanjutkan pengembangan sistem irigasi mereka sendiri.¹³

Adanya perkebunan-perkebunan yang tumbuh pesat mengakibatkan naiknya permintaan atas air. Jaringan-jaringan irigasi mulai dibuat pada masa ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan air untuk perkebunan. Pada tahun 1885 dibentuk Brigade Irigasi dibawah pimpinan Ir.Heskes. Setelah itu pada tahun 1889 dibentuk pula bagian irigasi dalam Departement B.O.W.¹⁴ Setelah pemerintahan Hindia Belanda mendirikan Departement B.O.W dan bagian irigasi. pada 1 Januari 1889 dibentuklah kantor-kantor irigasi, meliputi daerah yang masing-masing dianggap sebagai kesatuan wilayah pengairan, dan dalam prakteknya merupakan kumpulan daerah-daerah aliran sungai.¹⁵ Wilayah Sleman mendapatkan air melalui aliran sungai Progo, maka kelembagaan wilayah pengairannya dikelompokkan menjadi satu dengan wilayah lain yang memiliki aliran sungai yang sama.

Pembagian daerah – daerah irigasi menjadikan pengelolaan air menjadi lebih

¹² Vincent J.H. Houben, *op.cit.*, hlm 528.

¹³ Effendi Pasandaran, Reformasi Irigasi dalam Kerangka Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air, dalam *Analisis Kebijakan Pertanian* (Vol. 3, No. 3, 2005), hlm. 222.

¹⁴ Effendi Pasandaran (1984), *op.cit* hlm 9.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 10

teratur. Keteraturan ini menguntungkan bagi pertumbuhan perkebunan, terutama perkebunan tebu. Perkebunan tebu di Sleman tersebar diantaranya di distrik Godean, distrik Mlati, dan distrik Djoemeneng.¹⁶ Jumlah perkebunan di Sleman mencapai setengah dari jumlah perkebunan di Yogyakarta, yaitu 25 perkebunan dari 50 perkebunan yang ada.

Pesatnya pertumbuhan perkebunan-perkebunan mengakibatkan naiknya permintaan atas air. Jaringan-jaringan irigasi mulai dibuat pada masa ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan air untuk perkebunan. Pada tahun 1885 dibentuk Brigade Irigasi dibawah pimpinan Ir.Heskes. Setelah itu pada tahun 1889 dibentuk pula bagian irigasi dalam Departement B.O.W.¹⁷ Setelah pemerintahan Hindia Belanda mendirikan Departement B.O.W dan bagian irigasi, mulailah orang menghadapi masalah irigasi secara lebih teknis.

Mulailah dirasakan perlunya ada badan-badan yang mengelola masalah bagian air, sebab kalau tidak maka bangunan-bangunan irigasi yang telah dibuat dengan biaya besar tidak akan mungkin diambil manfaat sebesar-besarnya. Untuk keperluan tersebut, pada 1 Januari 1889 dibentuklah kantor-kantor irigasi, meliputi

daerah yang masing-masing dianggap sebagai kesatuan wilayah pengairan, dan dalam prakteknya merupakan kumpulan daerah-daerah aliran sungai.¹⁸ Wilayah Sleman mendapatkan air melalui aliran sungai Progo, maka kelembagaan wilayah pengairannya dikelompokkan menjadi satu dengan wilayah lain yang memiliki aliran sungai yang sama. Wilayah-wilayah pengairan ini ternyata tidak sama dengan wilayah administrasi pemerintahan. Kepala bagian irigasi adalah seorang Insinyur yang berpengalaman dan dibantu oleh beberapa insinyur lebih muda beserta sejumlah teknisi menengah. Setelah itu kemudian pada tahun yang sama terjadi perubahan menjadi *Departement Verker en Waterstaat*.¹⁹

C. PENGARUH PERKEBUNAN DAN PEMBANGUNAN IRIGASI TERHADAP KONDISI MASYARAKAT SLEMAN

Dengan adanya Politik Etis, saluran irigasi serta kelembagaannya semakin berkembang. Pada tahun 1918 wilayah Sleman termasuk ke dalam wilayah kasultanan Yogyakarta. Segala urusan yang bersangkutan mengenai wilayah ini menjadi kekuasaan kasultanan Yogyakarta, termasuk urusan irigasi. Adanya Departemen Irigasi memudahkan pengaturan air di pemerintahan karesidenan. Perbaikan dan pembangunan saluran baru banyak dilakukan demi kepentingan perkebunan,

¹⁶ Tashadi, dkk, *Sleman dalam Perjalanan Sejarah: Sebuah Kajian Melengkapi Dokumen Hari Jadi Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta: Pemerintah Kabupaten Sleman, 2000), hlm. 41.

¹⁷ Effendi Pasandaran (1984),*op.cit.*,hlm 9.

¹⁸ *Ibid.*,hlm 10

¹⁹ *Ibid.*,

tidak terkecuali Bendung Karang Talun dan saluran *Van der Wijck* di Sleman. Pemerintah kolonial Belanda membangun saluran irigasi *Van Der Wijck* serta Bendung Karang Talun pada tahun 1902. Pembangunan ini ditujukan untuk mengairi area pertanian, khususnya perkebunan tebu untuk wilayah Sleman.²⁰

Sementara itu, hingga tahun 1910, petani di Yogyakarta telah membangun beberapa fasilitas irigasi, yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem irigasi modern. Fasilitas irigasi tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3
Saluran Irigasi Wilayah Sleman

No.	Onderneming	Tipe Bangunan	Nama Bangunan
1.	Aquaduk Medari	Kanal Aquaduk	Sempoe II
2.	Sendang Pitoe	Kanal irigasi besar	Kanal Van der Wijk
3.	Padokan	Dam Permanen	Dam Permanen Tandjong
4.	Randoegunting	Dam	Dam Kringinan
5.	Medari	Dam	Dam Kali Bedok

Sumber: Machmoed Effendhie dan Arif Rahman Bramantya, "Waterschappen (Irrigation Agencies) Management in Vorstenlanden Surakarta and Yogyakarta, 1900-1942", *Humaniora* (Vol. 29, No. 2, 2017).

²⁰ Theresiana Ani Larasati, "Fungsi Selokan Mataram bagi Daerah Istimewa Yogyakarta", sumber: <http://bpad.jogjaprovo.go.id/library/download/selokanmataram>, diakses pada 11 Juli 2018, jam 09.10.

Khusus daerah *Vorstenlanden* (Yogyakarta dan Surakarta), pemerintah Hindia-Belanda membentuk badan tersendiri guna menangani masalah pengairan. Lembaga yang mengurus irigasi di wilayah *Vorstenlanden* adalah *Waterschap Centraal Kantoor voor Vorstenlanden*. *Waterschap Centraal Kantoor voor Vorstenlanden*, atau lebih dikenal *Waterschappen*, berbasis di Yogyakarta. Lembaga ini merupakan lembaga teknis dan pengawasan irigasi di wilayah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Waterschappen terbagi atas tiga wilayah kerja, yaitu *Waterschapp Dengkeng dan Bengawan* di Surakarta dan *Waterschapp Opak Progo* di Yogyakarta. *Waterschapp Dengkeng dan Bengawan* di Surakarta dan *Waterschapp Opak Progo* di Yogyakarta, bertanggung jawab untuk penataan irigasi teknis dan administratif. *Waterschapp* sebagai badan hukum diharapkan untuk bertindak netral dalam menyelesaikan konflik kepentingan antara pemilik dan petani yang sedang berlangsung. *Waterschap Vorstenlanden* berada di bawah lembaga *Departemen van Verkeer en Waterstaat*.²¹ *Waterschappen* dibentuk pada tahun 1917²²

²¹ Machmoed Effendhie dan Arif Rahman Bramantya, "Waterschappen (Irrigation Agencies) Management in Vorstenlanden Surakarta and Yogyakarta", 1900-1942", dalam *Humaniora* (Vol. 29, No. 2, 2017), hlm. 151.

²² *Ibid.*,

dengan tanggung jawab untuk penataan irigasi teknis dan administratif.

Saluran *Van der Wijck* merupakan saluran primer yang membawa air dari jaringan utama menuju saluran sekunder dan petak-petak tersier yang dialiri. Saluran sekunder dari Saluran *Van der Wijck* antara lain yaitu Saluran Sekunder Sendang Pitu, Sekunder Sedayu, Sekunder Sedayu Barat, Sekunder Sedayu Selatan, Sekunder Jamur Wetan, Sekunder Jamur Kulon, Sekunder Rewulu I dan II, Sekunder Cerbonan Wetan, Sekunder Cerbonan Kulon, Sekunder Gancangan, Sekunder Kergan, dan Sekunder Brongkol.²³

Perusahaan – perusahaan kolonial Belanda pada tahun 1914 yang diuntungkan dari aliran air saluran ini, antara lain yaitu perusahaan Beran di distrik Melati, Klatji di distrik Godean, Tjibongan di distrik Djoemeneng, Rewoeloe di distrik Godean, Sedajoe dan Padokan di distrik Gamping, serta Medariz di distrik Klegung. Perusahaan – perusahaan tersebut merupakan perusahaan penghasil tebu atau gula. Sedangkan tanaman tembakau yang mendapatkan aliran saluran Van der Wijck, yaitu Doekoe dan Pisangan, serta Kebonagoeng. Tidak hanya gula dan tembakau, saluran Van der Wijck juga

mengaliri perkebunan indigo di wilayah Boeloes di distrik Klegung.²⁴

Liberalisasi ekonomi di Eropa telah mengubah kebijakan ekonomi kolonial dari penghapusan *Cultur Stelsel* hingga penetapan *Agrarische Wet & Zuiker Wet*²⁵ yang menarik banyak pengusaha swasta Eropa menanamkan modalnya di perkotaan Jawa. Adanya 17 perkebunan tebu di Yogyakarta yang dimiliki oleh berbagai perusahaan Belanda²⁶, memaksa tanah rakyat untuk ditanami tebu daripada menerima pajak dalam bentuk barang. Industri gula membutuhkan tanah yang subur dengan irigasi yang baik, maka dari itu para pemilik perkebunan memilih daerah persawahan di Sleman, Bantul, dan Adikarta. Tentang perjanjian sewa-menyewa tanah bangsa Eropa dan pribumi untuk keperluan perkebunan diatur dalam *Rijksblad van Djogjakarta No. 2* tahun 1925. Dalam *Rijksblad van Djogjakarta* tersebut dijelaskan bahwa sewa-menyewa diatur perjanjian antara residen dan pemerintah lokal (pribumi) dengan syarat perkebunan tidak mengganggu pertanian pribumi, termasuk dalam hal pengairan. Pengolahan lahan pertanian membutuhkan air, baik untuk mengaliri sawah ataupun perkebunan, terutama perkebunan tebu.

²⁴ *Kolonial Verslag* tahun 1914

²⁵ Handinoto, *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa pada Masa Kolonial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 392.

²⁶ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm, 310.

²³ PT Gracia Widyakarsa, *Rencana Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Van der Wijck*, (Yogyakarta: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Proyek Irigasi Andalan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2004), hlm. II.2.

Perkebunan tebu selalu menimbulkan dampak yang cukup serius pada kehidupan para petani. Keseriusan ini diakibatkan oleh lahan yang harusnya digunakan bagi tanaman pangan terpaksa direlakan untuk tanaman tebu. Waktu yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman tebu mengakibatkan rusaknya pola tanam padi. Kebutuhan akan air untuk tanaman tebu, pada akhirnya menimbulkan pembagian air siang-malam. Semua air irigasi dialirkan ke perkebunan tebu di siang hari. Sawah penduduk hanya memperoleh air pada malam hari, sehingga siang hari sawah mereka kering. Pola irigasi yang diperuntukkan bagi perkebunan tebu didasarkan pada azas bahwa mereka yang menyewa tanah juga memperoleh hak irigasi. Hal ini mengakibatkan para petani tidak memiliki kesempatan untuk mengaliri sawahnya dikarenakan harus menjaga kebun tebu. Tersisa dua malam digunakan petani untuk mengatur pengairan ke sawahnya.²⁷

Irigasi di sleman yang lebih banyak ditujukan untuk perkebunan tebu, membukan lahan pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki lahan pertanian. Mereka juga bekerja sebagai pekerja kasar di pabrik-pabrik gula. Rakyat yang tidak memiliki lahan biasanya telah menyewakan lahannya bagi perkebunan tebu. Walaupun setiap tahun terdapat kenaikan harga sewa tanah, ternyata kehidupan petani belum beranjak dari kemiskinan. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan para petani yang

memiliki lahan pertanian, petani tidak mau menyerahkan dirinya serta lahan pertaniannya untuk disewakan pada pabrik. Ini dikarenakan tidak seimbangny murahny sewa dengan hasil yang diperoleh dari tanaman pangan.²⁸

Meskipun setiap petani harus membayarkan pajak terhadap lahan yang dipakainya. Pajak yang harus dibayarkan petani setidaknya f 1,5 setiap tahun untuk pemakain tanah. Beban petani tidak hanya membayar pajak, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan hidup. Upah seorang petani antara 30 – 40 sen per hari, sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari mencapai 38 sen. Upah tersebut merupakan ketentuan upah setelah adanya reorganisasi agraria. Sebelum reorganisasi, upah mereka antara 25 hingga 35 sen per hari.²⁹

Upah tersebut harus berkurang kembali dengan adanya tambahan pajak yang harus dibayarkan oleh petani. Selain pajak pemakaian tanah, rakyat juga diharuskan membayar pajak penggunaan air dan pajak pemeliharaan bangunan irigasi. Tercatat pada tahun 1930 hingga 1931, pajak yang harus dikeluarkan rakyat untuk pemakaian air yaitu f 1,06.³⁰

²⁸ Mubyarto, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta:Aditnya Media, 1992), hlm. 113.

²⁹ Feriyana Fajarwati, *loc.cit.*,

³⁰ HY. Agus Murdiyastomo, *Perkebunan, Irigasi, dan Perkembangan Masyarakat di Yogyakarta Selatan Awal Abad XX*, *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001), hlm. 111.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 327-328.

Pemerintah kolonial mengharuskan membayar pajak tersebut dengan uang tunai sehingga pajak ini cukup menyulitkan petani. Pendapatan bersih yang diterima dari hasil panen harus berkurang untuk membayar pajak penggunaan air. Sulitnya memperoleh uang mengingat kecilnya penerimaan yang didapatkan serta kebutuhan hidup yang semakin meningkat, maka sekecil apapun pajak yang harus dibayarkan tetaplah memberatkan bagi petani. Mengingat pajak penggunaan air memberatkan petani, maka dengan alasan tersebut pajak pemeliharaan bangunan irigasi diganti dengan kerja wajib. Kerja wajib mengharuskan penduduk bekerja secara suka rela dalam pemeliharaan saluran – saluran irigasi maupun pekerjaan-pekerjaan lain yang ditentukan oleh dewan pengairan. Meskipun tidak menggunakan uang, kerja wajib ini juga memberatkan.

Setelah adanya reorganisasi, banyak perubahan yang terjadi. Diantaranya, stratifikasi sosial yang terbentuk dengan susunan feodal berubah dan tanah menjadi milik masyarakat. Disamping perubahan kepemilikan tanah, muncul masalah sosial baru yaitu konflik tanah. Adanya reorganisasi yang justru dinilai semakin memberatkan petani, juga pembagian air irigasi yang tidak merata, mengakibatkan petani mulai melirik kegiatan ekonomi yang lain. Pada tahun 1928 muncul kelompok sosial baru, kelompok ini muncul didasarkan atas kesamaan pekerjaan yang dilakukan. Tahun 1917 dan 1918, pemerintah kolonial mengirimkan beberapa

pengrajin genting dari desa Berjo (Distrik Godeyan) ke Bandung untuk dididik di laboratorium keramik. Pengrajin-pengrajin genting di Berjo diberikan pinjaman untuk membangun tempat pembakaran batu merah dan genting. Perkumpulan ini mulai meluas ke seluruh daerah Godeyan.³¹ Kelompok lain juga mulai dibentuk, diantaranya di onderdistrik Gamping penduduknya mulai diajarkan menggunakan mesin tenun yang dibuat oleh Dinas Perusahaan.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa struktur sosial yang terbentuk pada masa sebelum politik etis dan reorganisasi agraria mendasarkan pada kepentingan terhadap pertanian. Struktur-struktur tersebut mempengaruhi penghasilan pengeluaran masyarakat. Semakin tinggi jabatan atau pekerjaan yang dilakukan, maka semakin besar penghasilannya. Kondisi ekonomi masyarakat Sleman tidak jauh dari ekonomi desa yang sederhana, meskipun berdampingan pula dengan kehidupan ekonomi pemerintah Hindia-Belanda yang teratur.

Sebelum mengenal kelembagaan modern, kelembagaan irigasi Sleman masih bersifat tradisional yaitu terdiri atas kelompok-kelompok pengguna air. Saluran irigasinya mengandalkan sistem gravitasi yakni

³¹ J. S. Furnival, *Hindia Belanda : Studi tentang Ekonomi Majemuk*, terj. Samsudin Berlian., (Jakarta: Fredoom Institute, 2009), hlm. 430.

mengalirkan air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang rendah, melalui saluran sederhana yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Masuknya penjajahan Belanda dengan adanya perkebunan-perkebunan, menimbulkan pemikiran modern atas irigasi. Kelembagaan-kelembagaan irigasi mengalami perkembangan dengan pesat pada masa Politik Etis. Pemerintah Kasultanan membangun saluran irigasi untuk mengairi wilayah Sleman yaitu Bendung Karang Talun dan Saluran Van der Wijck pada tahun 1902.

Adanya irigasi dan perkebunan wilayah Sleman, menimbulkan beberapa akibat di kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan dalam bidang ekonomi yaitu para petani mengalami kerugian diakibatkan adanya sistem pergantian siang-malam dalam irigasi yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya, serta adanya pajak penggunaan air dan pemeliharaan bangunan irigasi menambah daftar panjang penderitaan rakyat. Dampak yang lain terhadap masyarakat yaitu banyaknya perkebunan-perkebunan membuka banyak lapangan kerja. Dampak untuk ekonomi pemerintah kolonial tentunya menjadikan hal yang bersifat positif. Hasil-hasil perkebunan meningkat pesat dengan adanya irigasi teknis. Sedangkan dampak yang ditimbulkan pada kehidupan sosial masyarakat adalah berubahnya struktur sosial masyarakat. Perubahan ini dikarenakan adanya reorganisasi agraria.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Kolonial Verslag tahun 1914

Buku:

Daliman A. 2012, *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*, Yogyakarta: Ombak.

Anne Both, 1988, "Tinjauan Sejarah Perkembangan Irigasi di Indonesia pada Masa Sebelum Kemerdekaan", dalam Effendi Pasandaran dan Donald. C. Taylor (ed), *Irigasi: Kelembagaan dan Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Effendi Pasandaran, 1984, *Irigasi: Kelembagaan dan Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Handinoto, *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa pada Masa Kolonial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

J. S. Furnival, *Hindia Belanda : Studi tentang Ekonomi Majemuk*, terj. Samsudin Berlian., Jakarta: Freedom Institute, 2009.

Machmoed Effendhie dan Arif Rahman Bramantya, "Waterschappen (Irrigation Agencies) Management in Vorstenlanden Surakarta and Yogyakarta", 1900-1942", dalam *Humaniora*, Vol. 29, No. 2, 2017.

Mubyarto, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditnya Media, 1992.

Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2009.

- Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Tashadi, dkk, *Sleman dalam Perjalanan Sejarah: Sebuah Kajian Melengkapi Dokumen Hari Jadi Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Pemerintah Kabupaten Sleman, 2000.
- Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Uemuro Yasuo, "Perkebunan Tebu dan Masyarakat Pedesaan di Jawa", dalam Akira Nagazumi (ed), *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- PT Gracia Widyakarsa, *Rencana Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Van der Wijck*, Yogyakarta: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Proyek Irigasi Andalan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2004.
- Vincent J.H. Houben, *Keraton dan Kompeni : Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*, terj. E. Setiyawati Alkhatab., Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002
- Majalah
Effendi Pasandaran, Reformasi Irigasi dalam Kerangka Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air, dalam *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 3, No. 3, 2005.
- Tesis
HY. Agus Murdiyastomo, Perkebunan, Irigasi, dan Perkembangan Masyarakat di Yogyakarta Selatan Awal Abad XX, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001.
- Skripsi
Feri yana Fajarwati, "Legitimasi dan Reorganisasi Sistem Tanah Lungguh di Yogyakarta Awal Abad XX", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2007.
- Internet
Erman Mawardi, "Desain Hidraulik Bangunan Irigasi". Sumber: <http://www.galeripustaka.com/2014/03/sejarah-irigasi-di-indonesia.html>. Diakses pada 11 Juli 2018, jam 09.10.
- Theresiana Ani Larasati, "Fungsi Selokan Mataram bagi Daerah Istimewa Yogyakarta", sumber: <http://bpad.jogjaprovo.go.id/library/download/selokanmataram>, diakses pada 11 Juli 2018, jam 09.10.
- Biodata Penulis:
Nama : Primastuti Nur Malinda
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 10 Oktober 1993
Riwayat Pendidikan : TK Islam Bendosari, SD Muhammadiyah KedungBanteng II, SMPN 1 Moyudan, SMAN 1 Sedayu.

